

TESIS

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM OLEH PT. PLN (PERSERO) DI RIAK DANAU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Diajukan oleh:

FAHLEVI

NIM. 1920123009

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. KURNIA WARMAN, S.H., M. Hum**
- 2. Prof. Dr. ZEFRIZAL NURDIN, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM OLEH PT. PLN (PERSERO) DI RIAK DANAU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

(Fahlevi, NIM. 1920123009, Program Studi Magister Kenotariatan, Program
Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, vi + 98 Halaman, 2023)

ABSTRAK

Pengadaan untuk pembangunan gardu induk 150 KV oleh PT. PLN (Persero) UIP Sumbangteng, yang terletak di Nagari Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. bahwa penetapan pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk 150 KV tersebut, terjadi pada tahun 2017 dengan luas total 1,8 hektar dengan pemegang hak atas tanah ulayat kaum tersebut adalah anggota kaumnya yang sah namun upaya pelepasan haknya mengalami kekeliruan karena ditujukan kepada orang yang bukan pemilik hak atas tanah tersebut. Jenis penelitian pada penyusunan tesis ini ialah penelitian yuridis sosiologis. Hasil Penelitian ini adalah 1) Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gardu Induk 150 KV di Nagari Siak Danau Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu terdiri atas beberapa Tahapan yaitu (a) Tahap perencanaan yang memuat Maksud dan tujuan rencana pembangunan, Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, Letak tanah meliputi wilayah administrasi seperti nama desa, kelurahan, kecamatan, provinsi, Luas tanah yang dibutuhkan, Gambaran umum status tanah, Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, Perkiraan nilai tanah, (b) Tahap Persiapan yang memuat Pemberitahuan Perencanaan Pembangunan, Sosialisasi berupa Tatap Muka, Surat pemberitahuan, Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, Penetapan Lokasi Pembangunan, dan (c) Tahap Pelaksanaan yang memuat Inventarisasi dan Identifikasi, Penetapan Penilai. Musyawarah penetapan ganti kerugian, Pemberian Ganti Kerugian. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Gardu Induk 150 KVA di Nagari Riak Danau Tapan oleh PT. PLN (Persero) ini proses pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi tersebut memiliki kekeliruan, yaitu salah secara personalnya (*error in persona*) karena yang melakukan negosiasi dan urusan adalah orang yang hanya melakukan penggarapan atas tanah tersebut, dan bukanlah pemilik hak yang sebenarnya. 2) Akibat Hukum yang Timbul atas Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Tidak Menggunakan Akta Pelepasan Hak yaitu: cacat hukum dikarenakan pernyataan Melepaskan Hak yang dilakukan didepan Notaris lebih dapat dipertanggungjawabkan baik secara formil maupun material meskipun undang-undang memungkinkan adanya cara lain selain dari adanya akta notaril tentang pelepasan hak. Dengan demikian pemenuhan Teori Tanggung Jawab yang peneliti gunakan dalam tesis ini tidak terpenuhi, karena selain kurang dapat dipertanggungjawabkan keotentikan pernyataan pelepasan hak dari pemilik hak, dalam proses melengkapi dokumen-dokumen pernyataan yang dibuat dibawah tangan juga rentan terhadap pemalsuan dan hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Perseroan Terbatas (PT)

THE IMPLEMENTATION OF LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST BY PT. PLN (PERSERO) IN RIAK DANAU TAPAN PESISIR SELATAN DISTRICT

(Fahlevi, NIM. 1920123009, Master of Notary, Post-Graduate Program, Faculty of Law Andalas University, vi + 98 Pages, 2023)

ABSTRACT

Procurement for the construction of a 150 KV substation by PT. PLN (Persero) UIP Sumbagteng, which is in Nagari Riak Danau Tapan, Basa Ampek Balai Tapan District, Pesisir Selatan Regency. that the stipulation of land acquisition for the construction of the 150 KV substation took place in 2017 with a total area of 1.8 hectares with the holder of the communal land rights being a legitimate member of their clan but the attempt to relinquish their rights was a mistake because it was directed at a person who is not the owner of the rights over the land. The type of research in the preparation of this thesis is sociological juridical research. The results of this study are 1) Land Acquisition Process for the Construction of a 150 KV Substation in Nagari Siak Danau Tapan, Pesisir Selatan Regency, which consists of several stages, namely (a) The planning stage which contains the aims and objectives of the development plan, Compliance with the Regional Spatial Plan (RTRW)), and National and Regional Development Plans, Land layout includes administrative areas such as name of village, kelurahan, sub-district, province, Required land area, General description of land status, Estimated time for land acquisition implementation, Estimated timeframe for construction implementation, Estimated land value, (b) the Preparation Stage which includes notification of Development Planning, Dissemination in the form of face-to-face meetings, Letters of notification, Initial data collection of development plan locations, Determination of Development Locations, and (c) Implementation Phase which includes Inventory and Identification, Determination of Appraisers. Deliberation on determining compensation, granting compensation. In carrying out land acquisition for the purposes of building a 150 KVA substation in Nagari Riak Danau Tapan by PT. PLN (Persero) in the process of land acquisition and payment of compensation has made a mistake, which is a personal error (error in persona) because the person conducting the negotiations and dealings is the person who is only cultivating the land and is not the real owner of the rights. 2) Legal Consequences Arising from the Land Acquisition Process for Public Interests that Does Not Use the Deed of Relinquishment of Rights, namely: legal defects due to the statement of Relinquishment of Rights made before a Notary is more accountable both formally and materially even though the law allows for other ways other than the existence notary deed regarding the release of rights. Thus the fulfilment of the Theory of Responsibility that the researcher uses in this thesis is not fulfilled, because apart from not being able to account for the authenticity of the statement of waiver of rights from the owner of the right, in the process of completing documents the statement made underhand is also vulnerable to falsification and this is a crime.

Keywords: Land Procurement fo Public Interest, Limited Liability Company (LLC)